



Dapat Jatah

Rp1,8 Juta Per KK

■ 8.600 Warga Kota Yogya Nikmati Bantuan Sosial Tunai

TRIBUN, YOGYA - Sedikitnya 8.600 kepala keluarga (KK) yang tidak tercatat dalam Keluarga Sasaran Jaring Pengaman Sosial (KSJPS) segera menerima bantuan sosial tunai (BST) dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Para penerima manfaat ini telah tercatat dalam data kemiskinan.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, mengatakan, mekanisme distribusi BST untuk non KSJPS sama dengan sebelumnya, yaitu diantar langsung oleh petugas Kantor Pos ke rumah penerima.

"Ada sekitar 8.600an warga sasaran non KSJPS. Termasuk mereka yang masuk dalam data DTKS tetapi belum mendapat program bantuan dari Kemensos. Besarannya sama paket tiga bulan, Rp1,8 juta.

Heroe Poerwadi
Wakil Wali Kota Yogyakarta

● ke halaman 15

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
----------	--------------	-------	---------------

Dapat Jatah Rp1,8 Juta

• Sambungan Hal 9

sarannya sama paket tiga bulan, Rp1,8 juta," katanya, Minggu (17/5).

Menurut dia, bantuan dalam bentuk uang tunai lebih tepat. Sebab, kebutuhan masyarakat berbeda-beda. Selain itu, dengan bantuan tunai juga diharapkan dapat menghidupkan ekonomi lingkungan sekitar penerima.

Ia mengimbau warga yang menerima BST untuk memanfaatkan bantuan dengan bijaksana.

"Jangan sampai uang habis sebelum waktunya, untuk membeli barang-barang yang tidak menjadi prioritas," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, Agus Sudrajat mengungkapkan pendekatan yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan menggunakan parameter yang sama dengan pendataan KSJPS.

"Pendekatan pakai parameter KSJPS, karena bantuan ini adalah bantuan APBD Kota Yogyakarta. Tahap pertama sudah diluncurkan. Nah, sisanya itu data DTKS yang masuk program, kami verifikasi kembali, apakah dia layak atau tidak mendapat bantuan," ungkapnya.

Ia melanjutkan dari sekitar 8.600 penerima BST non KSJPS, 1.005 diantaranya sudah tidak termasuk dalam DTKS. "Jadi yang 1.005 itu pada pendataan 2018 masuk dalam DTKS. Lalu 2019 pendataan 2019 sudah dikeluarkan karena secara ekonomi sudah bangkit. Karena baru bangkit, kami khawatir terdampak Covid-19. Makanya kami verifikasi lagi," lanjutnya.

Jangan ganda

Ia mengakui bahwa pemberian bantuan sedikit terlambat, sebab pihaknya harus menyesuaikan berbagai data, agar tidak ada penerima ganda. "Satu KK itu satu bantuan. Kami harus tarik data, dari penerima manfaat menjadi KK. Kami ciptakan program khusus, setelah itu baru kami minta bantuan teman-teman lapangan. Karena tidak boleh ganda, harus hati-hati betul," terangnya.

Ada tiga hal yang mendasari Dinsos Kota Yogyakarta dalam memberikan bantuan, yaitu fakta, legalitas, dan anggaran. "Fakta adalah fakta banyak warga yang terdampak. Legalitas artinya kita harus mengacu pada data kemiskinan, tidak boleh asal memberikan. Sementara anggaran, artinya kita harus menyusun skala prioritas, yang miskin yang kita dahulukan," tambahnya.

Sementara itu, Pemerintah daerah (Pemda) DIY menyala-

urkan bantuan sosial pada sedikitnya 169.383 kepala keluarga (KK). Nilai total bantuan yang digelontorkan untuk bansos ini senilai Rp202,3 miliar. Penyaluran akan dimulai pada Minggu (17/5) untuk Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul.

Sudah disalurkan

Wakil Ketua Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY, Biwara Yuswantana, menjelaskan, pemberian bantuan tahap pertama sudah diberikan mulai Minggu (17/5) kemarin. Pemberian bantuan tersebut disalurkan per kecamatan yang ada di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Pemda DIY menargetkan tiga hari ke depan.

Jumlah penerima bantuan di Kulonprogo secara klasifikasi sebagai berikut. Untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 20 KK, sedangkan penerima bantuan sembako reguler totalnya 20.846 keluarga, sedangkan penerima sembako perluasan mencapai 6.715 keluarga.

Sementara untuk wilayah Gunung Kidul, lanjutnya, penerima bantuan PKH mencapai 1.963 keluarga, penerima sembako reguler mencapai 26.036 keluarga, untuk penerima sembako perluasan mencapai 17.693 keluarga.

"Untuk tahap awal ini kita mulai di Kecamatan Nanggulan di Kulon Progo dan Keca-

matan Wonosari di Kabupaten Gunungkidul. Menyusul kecamatan lain, begitu seterusnya," katanya.

Ia melanjutkan, untuk percepatan penyaluran, Biwara juga menyampaikan hari Senin (18/5) juga akan dilakukan penyaluran bantuan di Kabupaten Sleman.

Data penerima bantuan untuk wilayah Sleman, sebanyak 1.405 keluarga penerima PKH, 12.961 keluarga penerima sembako reguler, serta 24.950 keluarga penerima sembako perluasan.

Bantuan yang khusus dari Pemda DIY hanya sebesar Rp 400 ribu per keluarga per bulan. Bantuan tersebut disalurkan dari Bank BPD DIY yang bisa diambil di kantor kelurahan/desa masing-masing.

Total anggaran yang disepakati pun mencapai Rp 203,259 miliar. Sementara jika di total seluruh penerima bantuan di wilayah DIY jumlahnya sebanyak 169.383 keluarga. Penerima bantuan tersebut merupakan warga yang mendapat bantuan PKH, BLT atau bantuan dari pusat lainnya. Namun, tidak semua penerima PKH mendapat bantuan dari Pemda DIY.

"Mereka yang diberi bansos dari pemda itu adalah penerima PKH yang nilainya kurang dari Rp 600 ribu. Jadi kami menggenapinya," tegasnya. (maw/hda)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005